

Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna

Author:

Muh Rivandy Setiawan¹, Fadhil Abdullah²

Affiliation:

Universitas Muhammadiyah Bandung¹, Pemerintah Kabupaten Natuna²

752 Jalan Soekarno-Hatta 40614 Panyileukan Jawa Barat¹

Jl. Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau²

Email :

muhrivandysetiawan@gmail.com¹, fadhilabdullah1703@gmail.com²

Abstract

This study aims to evaluate the efforts of the Natuna Regency Tourism Office in optimizing local revenue, identifying barriers, and analyzing tourism destination management strategies. Using a descriptive qualitative method with an inductive approach, this study collected data through observation, interviews, and documentation, and used method triangulation for validation. Data analysis included data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with reference to the theory of PAD increase according to Rahayu. The results showed that PAD from tourism objects is still low, with the main inhibiting factors being the lack of public awareness of tax payments and the dominance of tourism object ownership by the community. The largest source of PAD comes from the hotel, restaurant and resort sectors, and is influenced by the high cost of transportation in Natuna. To increase PAD, better cooperation with the community is needed as well as increased promotion and development of tourist destinations.

Keywords: Maritime Tourism, PAD, Natuna.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), mengidentifikasi hambatan, dan menganalisis strategi pengelolaan destinasi wisata. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan triangulasi metode untuk validasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengacu pada teori Peningkatan PAD menurut Rahayu. Hasil penelitian menunjukkan PAD dari objek wisata masih rendah, dengan faktor penghambat utama berupa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan dominasi kepemilikan objek wisata oleh masyarakat. Sumber PAD terbesar berasal dari sektor hotel, restoran, dan resort, serta dipengaruhi oleh mahalnya biaya transportasi di Natuna. Untuk meningkatkan PAD, diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat serta peningkatan promosi dan pengembangan destinasi wisata.

Kata Kunci: Wisata Bahari, PAD, Natuna.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan populasi sekitar 270 juta jiwa, memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Keanekaragaman suku dan budaya di setiap daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Potensi wisata yang melimpah ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dengan menggali dan mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 2014).

Kabupaten Natuna, yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki letak geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional. Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Sumatera Selatan dan Jambi di sebelah selatan, Malaysia dan Singapura di sebelah barat, serta Malaysia timur dan Kalimantan Barat di sebelah timur. Dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk terumbu karang, pantai berpasir putih, pulau-pulau kecil, gunung, hutan, goa, air terjun, dan formasi batuan alam, Natuna memiliki potensi wisata yang luar biasa (Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, 2021-2026).

Namun, meskipun memiliki potensi alam yang besar dan telah diakui sebagai Geopark Nasional, sektor pariwisata di Kabupaten Natuna belum mampu memenuhi ekspektasi sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Berbagai hambatan seperti kondisi geografis, transportasi, dan masalah infrastruktur menjadi tantangan yang harus diatasi. Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara turun drastis dari 426 orang pada 2019 menjadi hanya 53 orang, sementara kunjungan wisatawan nusantara menurun dari 19.412 orang menjadi 8.615 orang (BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023).

Meskipun demikian, sektor pariwisata mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2023, kunjungan wisatawan mancanegara meningkat menjadi 404 orang, dan kunjungan wisatawan nusantara mencapai 20.721 orang. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan, meskipun masih fluktuatif. Pengeluaran wisatawan nusantara meningkat signifikan, mencapai Rp 114.130.500 ribu pada 2023, menunjukkan potensi besar dari pariwisata domestik

Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Natuna masih relatif rendah dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam, misalnya, menyumbang 55,20% dari total PAD provinsi, sementara Kabupaten Natuna hanya menyumbang 2,87% (BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, perlu mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang

ada dan mengembangkan potensi wisata Natuna agar dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

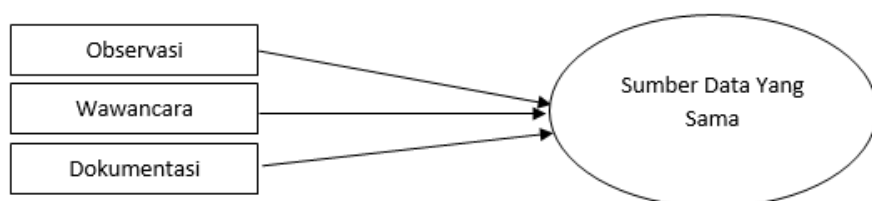
Data menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Natuna mengalami dinamika yang signifikan dalam periode 2019-2023. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam dalam kunjungan wisatawan pada tahun 2020, namun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Natuna juga mengalami fluktuasi, mencerminkan dampak pandemi dan proses pemulihan. Meskipun demikian, potensi pariwisata Natuna masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan wisata bahari di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, serta apa saja hambatan dan strategi yang diperlukan dalam pengelolaan destinasi wisata di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi cara Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisis strategi yang diperlukan dalam pengelolaan Destinasi Wisata Natuna.

Berdasarkan tinjauan literatur dari 10 penelitian sebelumnya, dapat dirangkum bahwa pengembangan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menjadi fokus berbagai studi. Peneliti seperti Asriandy menggunakan teori strategi pengembangan dan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis potensi wisata daerah. Hasil penelitian tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan strategi promosi yang efektif (Asriandy, 2016).

METODE PENELITIAN

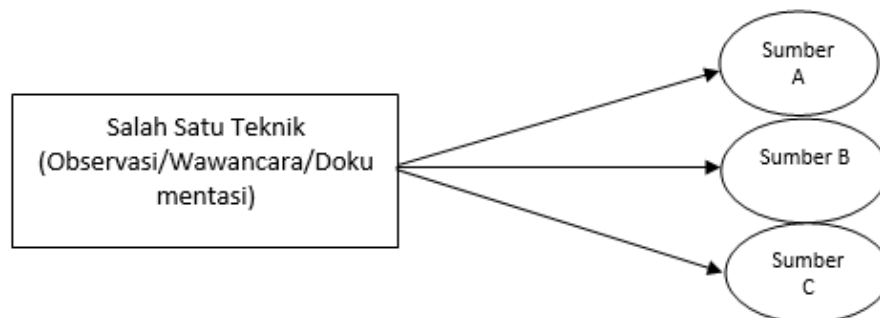
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta secara nyata tanpa penambahan atau pengurangan data. Metode ini cocok untuk memahami konteks lokal secara mendalam dan menggambarkan fenomena yang kompleks dalam lingkup studi kasus tertentu (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dengan informan kunci yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang kaya dan kontekstual (Patton, 2002).



Gambar 1. Triangulasi Metode Pengumpulan Data

Triangulasi metode, yang melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data untuk sumber informasi yang sama, merupakan langkah penting dalam penelitian ini. Tiga metode utama yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang secara bersamaan diterapkan untuk memverifikasi dan memperkaya data yang diperoleh dari sumber informasi tunggal (Denzin, 1978). Penggunaan berbagai metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang fenomena yang diteliti, serta meningkatkan validitas data penelitian (Maxwell, 2013).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertindak sebagai human instrument, didukung dengan alat bantu seperti pedoman wawancara, kamera, dan alat tulis. Pendekatan ini dianggap efektif dalam penelitian kualitatif karena peneliti dapat terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data (Lincoln & Guba, 1985). Operasionalisasi konsep berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan dimensi-dimensi seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lainnya yang dijadikan sebagai indikator dalam analisis data.



Gambar 2. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

Triangulasi sumber, yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data untuk memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh, juga diterapkan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk pejabat Dinas Pariwisata, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan wisatawan, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya (Yin, 2018). Proses perbandingan dan konfirmasi informasi dari berbagai sumber ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas analisis data, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi perbedaan perspektif atau informasi yang ada di antara berbagai sumber, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik penelitian (Flick, 2004).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi metode, sumber, penyidik, dan teori. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya Kabupaten Natuna dikenal sebagai wilayah Pulau Tujuh, terdiri dari tujuh kecamatan besar di perairan Laut Cina Selatan, yang kini disebut Laut Natuna Utara. Kecamatan tersebut adalah Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan. Berdasarkan Surat

Keputusan Delegasi Republik Indonesia No.9/Depart tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonom Tingkat II.

Pembentukan Kabupaten Natuna dikukuhkan berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Natuna terdiri dari 6 kecamatan pada tahun 1999 dan telah dimekarkan menjadi 16 kecamatan pada akhir tahun 2006, meskipun hanya 11 kecamatan yang tercatat secara resmi.

Iklim di Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh perubahan arah angin, dengan musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Juli. Topografi Natuna terdiri dari tanah berbukit dan bergunung batu, dengan dataran rendah dan landai di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antar kecamatan bervariasi antara 3 hingga 959 meter di atas permukaan laut.

Pengembangan sektor wisata bahari di Kabupaten Natuna sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang menjadi penentu dan penilaian pariwisata Natuna. Sektor-sektor dalam perekonomian dapat dibagi menjadi sektor basis dan nonbasis, dengan sektor basis mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan bahkan mengeksport ke luar daerah.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah objek wisata berkorelasi positif dengan peningkatan retribusi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi di negara-negara ASEAN juga menemukan bahwa sektor pariwisata memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Dea Ajeng Inggil Santosa et al., 2019).

Tabel 1. Tabel Total PAD Kabupaten Natuna

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2018	47.952.668.664,58	969.214.535.605,48	4,95
2019	56.417.450.262,53	1.350.963.641.174,67	4,18
2020	51.531.072.260,05	926.421.008.386,66	5,56
Rata-Rata	55.607.000.495,104.	1.087.872.913.337,40	5,23

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKAD, sektor pariwisata di Natuna masih minim pendapatannya. Namun, terjadi peningkatan signifikan dalam pajak hotel dari sekitar 100 juta menjadi 700 juta pada tahun 2023, didukung oleh beroperasinya beberapa resort baru. (BPKAD Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Prov. Kepri, 2023.)

Tabel 2. Data Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Luas (km²/sq.km)	Ibu Kota
1	Midai	13,8	Sabang Barat
2	Suak Midai	12,45	Batu Belanak
3	Bunguran Barat	248,38	Sedanau
4	Bunguran Utara	405,88	Kelarik
5	Pulau Laut	37,64	Air Payang
6	Pulau Tiga	41,55	Sabang Mawang Barat
7	Bunguran Batubi	214,81	Batubi Jaya

No	Kecamatan	Luas (km ² /sq.km)	Ibu Kota
8	Pulau Tiga Barat	17,41	Pulau Tiga
9	Bunguran Timur	142,14	Ranai
10	Bunguran Timur Laut	299,42	Tanjung
11	Bunguran Tengah	85,95	Harapan Jaya
12	Bunguran Selatan	234,56	Cemaga
13	Serasan	44,99	Serasan
14	Subi	146,33	Subi
15	Serasan Timur	26,61	Arung Ayam
Natuna		1.978,19	Ranai

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna berada di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Tugas utama badan ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan serta aset daerah.

Visi: Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan menuju pelayanan keuangan yang prima dan profesional.

Misi:

1. Menciptakan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Up To Date.
2. Menciptakan Sistem Manajemen dan perangkat yang memadai dari segi sarana, metode, dan regulasi.

Struktur Organisasi:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat (Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program)
3. Bidang Anggaran (Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Pengendalian Anggaran)
4. Bidang Perbendaharaan (Sub Bidang Gaji, Sub Bidang Kas Daerah)
5. Bidang Akuntansi (Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bidang Pembukuan)
6. Bidang Aset (Sub Bidang Pendataan dan Perawatan Aset, Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset)



Sumber: BPKAD Kabupaten Natuna, 2022

Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Natuna

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan pariwisata secara luas, mencakup berbagai aspek seperti objek wisata, daya tarik wisata, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Pengembangan sektor wisata bahari di Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Sektor basis dalam perekonomian adalah sektor yang mampu memenuhi atau melayani kebutuhan pasar di daerah sendiri dan mengeksport barang dan jasa keluar daerah. Sektor nonbasis hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar daerah sendiri dan harus mengimpor dari luar daerah. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah objek wisata berhubungan dengan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya, peningkatan jumlah objek wisata sebesar 1 unit dapat meningkatkan penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus sebesar Rp12.840.000.

Strategi untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata melibatkan pengembangan subsektor pariwisata yang terbukti berpengaruh positif pada peluang usaha dan kesempatan kerja. Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci dalam pengembangan ini.

Menurut hasil wawancara, sektor tertinggi untuk restoran adalah rumah makan Sisi Basisir, dan untuk hotel dan resort adalah Adiwana Jelita Sejuba dan Natuna Dive Resort (NDR). Peningkatan jumlah tempat wisata diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor pariwisata.

Tujuan utama dari peningkatan retribusi pariwisata. Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas, tempat rekreasi. Untuk meningkatkan ketertiban pengunjung serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

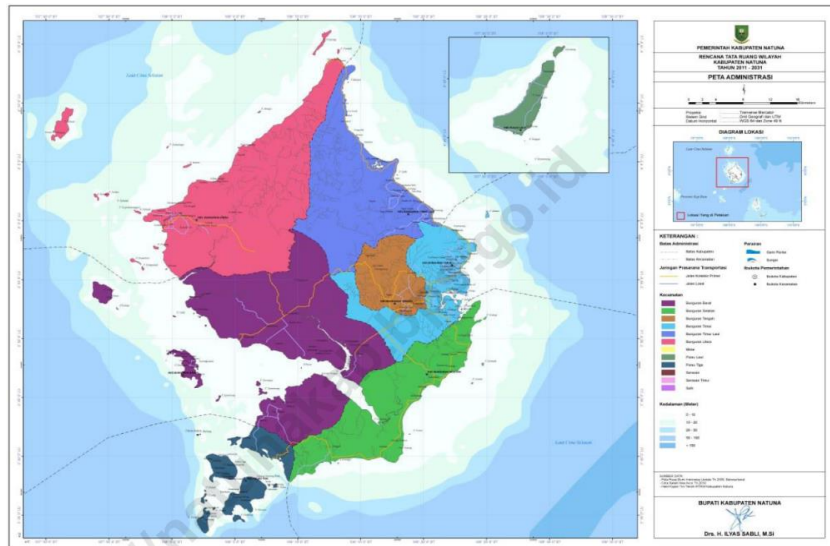
Tabel 3. Tabel Perkembangan PAD Pariwisata Kabupaten Natuna

NO	Jenis Pajak	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	90.000.000,00	121.750.000,00	130.000.000,00	450.000.000,00	600.000.000,00
2	Pajak Restoran	800.000.000,00	1.200.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,0	2.500.000.000,00
3	Pajak Hiburan	12.500.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00	19.226.000,00	20.050.000,00

Tujuan utama peningkatan retribusi pariwisata adalah untuk meningkatkan pelayanan fasilitas, tempat rekreasi, ketertiban pengunjung, serta PAD. Retribusi pariwisata dianggap sebagai salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Kabupaten Natuna memiliki potensi wisata yang sangat besar, termasuk pulau-pulau kecil yang indah, pantai berpasir putih, air laut jernih, dan terumbu karang yang masih terjaga. Potensi wisata bahari seperti diving, snorkeling, dan trekking masih belum banyak dieksplorasi.

Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan objek wisata adalah BUMDES Cemaga yang mengelola pantai Batu Kasah. Mereka berhasil secara mandiri mengembangkan dan mendapatkan keuntungan dari objek wisata melalui retribusi parkir dan penyewaan alat.



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Natuna

Penyebab Minimnya PAD di Sektor Pariwisata dengan tantangan yang dihadapi termasuk kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak dan retribusi, pengelolaan objek pajak dan retribusi yang membutuhkan pemantauan dan penegakan hukum yang efektif, serta kerjasama yang baik untuk para pemungut pajak dan retribusi.

Solusi untuk meningkatkan pendapatan PAD adalah melalui pengoptimalan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah dapat menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat peraturan daerah baru untuk menerapkan pajak dan retribusi daerah.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan minimnya PAD termasuk kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan potensi asli daerah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, serta kelemahan kualitas SDM aparatur.

Kendala lain yang dihadapi termasuk banyaknya lahan wisata yang dimiliki oleh masyarakat, kurangnya komitmen dari pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan wisata, dan kurangnya promosi wisata Natuna dibandingkan dengan daerah lain.

Untuk mengatasi hambatan pengembangan pariwisata, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, serta menerapkan pajak dan retribusi baru. Penyempurnaan peraturan daerah dan pembuatan perda baru juga diperlukan.

Pengembangan destinasi wisata perlu memperhatikan empat komponen kepariwisataan: Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Ansilari. Ini mencakup pengembangan daya tarik wisata, peningkatan aksesibilitas, penyediaan fasilitas penunjang, dan layanan tambahan.

Berikut ini penjelasan Strategi Pengembangan Pariwisata:

1. Atraksi (Attraction): Mengembangkan objek wisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan.
2. Aksesibilitas (Accessibility): Meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk memudahkan wisatawan mencapai destinasi wisata.

3. Amenitas (Amenities): Menyediakan fasilitas penunjang pariwisata seperti akomodasi, restoran, dan fasilitas umum lainnya.
4. Ansilari (Ancillary Services): Meningkatkan layanan tambahan seperti pusat informasi turis dan layanan medis.

Upaya lain untuk meningkatkan PAD meliputi intensifikasi (menghitung potensi retribusi seakurat mungkin) dan ekstensifikasi (menggali sumber-sumber objek pajak baru). Penyusunan perda baru juga diperlukan untuk merespon perubahan ketentuan dan memungkinkan penarikan jenis pajak atau retribusi daerah baru.

Berikut ini penjelasan dari Intensifikasi dan Ekstensifikasi:

1. Intensifikasi: Menghitung potensi retribusi seakurat mungkin agar target penerimaan mendekati potensinya.
2. Ekstensifikasi: Mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak dan menjaring wajib pajak baru.

Berikut ini respon dalam menyusun Perda Baru:

1. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
2. Menyusun perda baru untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah.
3. Menyusun perda baru untuk merespon perubahan ketentuan yang disusun oleh pemerintah daerah dengan dilahirkannya perda baru yang memayungi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Hakim, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa retribusi pariwisata merupakan industri yang berpotensi menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat di Kabupaten Natuna, dengan kontribusi terbesar berasal dari hotel, restoran, dan resort. Namun, pendapatan PAD masih minim karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, serta banyaknya objek wisata yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak dapat diserap menjadi pendapatan PAD. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama masyarakat, serta meningkatkan promosi dan pengembangan objek wisata.

Saran yang diberikan meliputi peningkatan kerja sama antara pemerintah setempat dengan pihak-pihak pendukung pengembangan wisata, pemanfaatan kelebihan objek wisata yang ada untuk meningkatkan minat wisatawan dan memaksimalkan potensi keindahan alam, serta melakukan upaya untuk mengatasi kelemahan dan ancaman pada setiap objek wisata. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Natuna dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriandy, I. (2016). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng. Universitas Hasanuddin.
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta,. Pustaka Pelajar
- Dea Ajeng Inggil Santosa, E., Shaleh, C., & Hadi, M. (2019). PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI LOKAL (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan). In Jurnal Administrasi Publik (JAP) (Vol. 3, Issue 1).
- Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.
- Flick et al,. (2004). A Companion to Qualitative Research. London: Sage Publications. 4th ed
- Hakim, M. R. (2018). *Strategy to Increase Local Revenue in Anambas Island Regency* (Vol. 10, Issue 1).
- Maxwell Joseph A. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive Approach 3th Edition, California: Sage Publications, Inc.
- Patton, M. Q. 2002. Qualitative Research & Evaluation Methods.Third Edition. California: Sage Publications
- Pemerintah Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, 2021-2026
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).
- Lincoln and Guba. (1985). Qualitative Research. Singapore. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co.
- Yin, Robert. K. (2018). Case Study Research and Applications Design and. Methods (Sixth Editions). Singapore: SAGE Publications, Inc.